



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

# LAPORAN MONITORING KINERJA KEPALA SEKRETARIAT PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2023

Jl. Drs. Ahmad Nadjamuddin No. 107 Kel. Limba U II  
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

<http://www.gorontalo.bawaslu.go.id>

[set.gorontalo@bawaslu.go.id](mailto:set.gorontalo@bawaslu.go.id)

Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bawaslu Gorontalo

Bawaslu Gorontalo



BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU  
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

## Laporan Monitoring Kinerja Kepala Sekretariat Periode Agustus Tahun Anggaran 2023

**Provinsi/Kabupaten/Kota: Provinsi Gorontalo**

### **A. Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Manajemen Kepegawaian**

1. Analisis Data (Data Kepegawaian Eksisting beserta Jumlah Kebutuhan Pegawai)
  - a) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 120/KU.01.00/K1/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Perubahan ke delapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - b) Bahwa berdasarkan kebutuhan pegawai pada sekretariat Bawaslu Boalemo masih memerlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah dalam hal penugasan pegawai DPK sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B./853/M.SM.02.00/2021 tanggal 21 Desember 2021;
  - c) Bahwa penetapan jabatan PNS dengan status penugasan yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - d) Sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 193/KU.00/SJ/06/2023 tentang Penetapan Satuan Kerja Unit Kerja Mandiri Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Bawaslu, bahwa telah dilaksanakan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Bawaslu, terutama sudah dilantiknya Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Berikut adalah daftar Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Bawaslu Kabupaten Pohuwato yang dilantik:
    - Rahmat Mantau, S.Pd., M.Pd., M.Mpub. jabatan Kepala Subbagian Administrasi;
    - Asni Saiqi, S.Sos. jabatan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum;
    - Herlinda Mansur, S.M. jabatan Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat.
  - e) Sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2253.1/KP.01.01/SJ/07/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal. Terdapat 1 (satu) orang Pegawai terlantik atas nama Agus Laingo yang ditempatkan pada Unit Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo dengan Jabatan Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023.
  - f) Penambahan pegawai PPPK memberikan tambahan dukungan sumber daya di Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo, di sisi lainnya terdapat pengurangan sumber daya manusia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dikarenakan pegawai PPPK di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
2. Permasalahan
  - a) Unit Kerja Mandiri Bawaslu Kabupaten Boalemo sudah memiliki Kuasa Pengguna Anggaran dan Penguasa Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum ter tanggal 27 Maret 2023 akan tetapi sampai dengan sekarang belum berubah menjadi Satker Bawaslu Kabupaten Boalemo.
  - b) Formasi jabatan yang disediakan dalam analisis jabatan pada sekretariat Bawaslu tidak bersesuaian dengan anjab pada instansi induk dalam hal Pemerintah Daerah.

- c) Penugasan PNS yang akan dipekerjakan di Sekretariat Bawaslu harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri PANRB.
  - d) Lambatnya proses persetujuan pindah/lolos butuh dari Bawaslu.
  - e) Lambatnya Proses Persetujuan atas Pengajuan Gaji Berkala Periode Januari 2023
  - f) PNS yang bertugas diluar daerah tidak beroleh hak/jaminan perumahan
  - g) PPNPN yang akan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Menpan RB.
  - h) Formasi pendidikan yang dibuka untuk PPPK Bawaslu tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan bawaslu.
  - i) Belum adanya perekrutan ASN untuk Bawaslu, membuat penambahan PNS Organik tidak akan terpenuhi dengan cepat pada Bawaslu Kota Gorontalo.
  - j) Ketidak jelasan status PPNPN memungkinkan pada tanggal 28 November 2023, Bawaslu Kota Gorontalo akan kehilangan Pegawai PPNPN. Yang mana hal ini secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja dalam hal Pengawasan Pemilu.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a) Sudah Mengajukan Pengusulan Nama sebagai KPA, PPSPM, Bendahara untuk persiapan Satker Bawaslu Kabupaten Boalemo.
  - b) Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) memiliki peran sangat strategis dalam menentukan netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga Negara yang relatif muda, kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagian besar didukung oleh PNS DPK mulai dari tingkatan pusat hingga ke daerah, untuk itu sangat penting dalam hal penambahan PNS di tingkat Daerah mengingat peran PNS DPK sangat besar kontribusinya dalam menjalankan amanat Undang-Undang untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu yang demokratis, untuk itu harus tetap bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait permintaan PNS DPK.
  - c) Perlu perhatian khusus terkait tempat tinggal PNS yang ditugaskan di Luar Domisili.
  - d) PPNPN yang saat ini sedang berada di Bawaslu Kabupaten Boalemo agar tetap dipertahankan di Bawaslu mengingat masa kerja yang sudah lama dan masih dalam Tahapan.
  - e) Sudah Mengajukan usulan kenaikan Gaji berkala bagi Pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 6 Desember 2022 melalui email dan pengiriman dokumen dengan surat pengantar Nomor 085/KP.03.01/GO/03/2023.
  - f) Permasalahan yang terjadi sudah dikonsultasikan dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan masih menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu RI
  - g) Terdapat pegawai PPNPN yang lulus pada seleksi Calon Anggota Komisioner KPU Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028 atas nama:
    - Roy Hamrain Staf Teknis pada Bawaslu Provinsi Gorontalo;
    - Yuyun Antu Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Boalemo;
    - Dian F. Pakaya Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

## **B. Keuangan**

### **1. Analisis Data (Realisasi Anggaran)**

- a. Dalam periode yang tercakup oleh laporan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan revisi anggaran sebanyak 5 kali. Berikut adalah rincian revisi anggaran yang telah dilakukan:
  - 1) Revisi Anggaran Ke-1 tanggal 23 Desember 2022:
    - Mekanisme revisi DJA dalam rangka revisi Automatic Adjustment (AA) belanja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - 2) Revisi Anggaran Ke- 2 tanggal 20 Februari 2023:
    - Mekanisme revisi kanwil dalam rangka pemutakhiran revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

- 3) Revisi Anggaran Ke- 3 tanggal 10 April 2023:
- Mekanisme revisi kanwil dalam rangka pemutakhiran revisi POK dan revisi halaman III DIPA.
- 4) Revisi Anggaran Ke- 4 tanggal 03 Juli 2023:
- Mekanisme revisi DJA dalam rangka Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023.
- 5) Revisi Anggaran Ke- 5 tanggal 21 Juli 2023:
- Mekanisme revisi DJA dalam rangka pemutakhiran revisi POK dan Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* T.A. 2023.
- b. Pada bulan Agustus Tahun 2023 Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2,994,586,206,- dari pagu sebesar Rp50,374,641,000,- dengan persentase sebesar 5.94%. Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mencapai sejumlah pencapaian dalam realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan anggaran dengan efisien dan transparan.
- c. Sedangkan pelaksanaan anggaran Tahun 2023 Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Agustus Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 57.73% atau sebesar Rp29,079,408,394,- dari total pagu sebesar Rp50,374,641,000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran perjenis belanja berdasarkan pada situs [spanint.kemenkeu.go.id](http://spanint.kemenkeu.go.id):

| Keterangan | Jenis Belanja |                |             | Total          |
|------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|            | Pegawai       | Barang         | Modal       |                |
| 1          | 2             | 3              | 4           | 5              |
| Pagu       | 5,594,916,000 | 44,599,725,000 | 180,000,000 | 50,374,641,000 |
| Realisasi  | 4,293,809,837 | 24,650,548,557 | 135,050,000 | 29,079,408,394 |
| Persentase | 76.74%        | 55.27%         | 75.03%      | 57.73%         |

Adapun rincian dari Realisasi Belanja Pegawai (51) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Gaji Ketua dan Anggota Provinsi dan Kabupaten/Kota bulan Agustus Tahun 2023 sebesar Rp2,036,047,500,-. Realisasi tersebut berupa honor Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Non Satker) Bulan Januari s/d Agustus, THR, dan Gaji 13.
- 2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
  - i. Gaji Pokok  
Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS sampai bulan Agustus Tahun 2023 sebesar Rp.1,040,062,240,-. Gaji Pokok yang dibayarkan berupa gaji induk bulan Januari sampai Agustus, THR, Gaji 13, dan kekurangan gaji induk 4 pegawai (ditanyakan ke keuangan apabila ada kekurangan) bulan Januari 2023.
  - ii. Tunjangan Struktural  
Realisasi Belanja Tunjangan Struktural PNS sampai bulan Agustus Tahun 2023 sebesar Rp.84,505,000. Realisasi tersebut berupa gaji induk bulan Januari sampai Agustus, THR, Gaji 13, dan kekurangan gaji induk 4 pegawai (ditanyakan ke keuangan apabila ada kekurangan) bulan Januari 2023.
  - iii. Tunjangan Fungsional  
Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional PNS sampai bulan Agustus Tahun 2023 sebesar Rp.42,141,000,-. Realisasi tersebut berupa tunjangan bulan Januari sampai Agustus, THR dan Gaji 13.
  - iv. Tunjangan Kinerja  
Realisasi Belanja Tunjangan Kinerja PNS sampai bulan Agustus 2023 sebesar Rp.893,494,186,-. Realisasi tersebut berupa tunjangan kinerja bulan Januari sampai Juli, THR, Gaji 13.

3) Uang Makan PNS

- i. Belanja Uang Makan PNS sampai bulan Juli Tahun 2023 sebesar Rp.152,751,000,-. Realisasi tersebut berupa uang makan PNS bulan Januari sampai Juli Tahun 2023.

Untuk Realisasi Belanja Barang (52) di Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui mekanisme Pembayaran dengan menggunakan sistem:

1) Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Hingga bulan Agustus Tahun 2023 Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengajukan 1 kali TUP dengan rincian TUP ke-1 sebagai berikut:

| TUP KE-1 |        |                    |                  |
|----------|--------|--------------------|------------------|
| NO       | SPM    | PROVINSI/KAB/KOTA  | NILAI SP2D       |
| 1        | 00214A | Provinsi Gorontalo | Rp.275.418.000,- |

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke-1 sebesar Rp.275.418.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.275.418.000,- atau 100%. Dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp,0,- atau 0.00%.

2) Ganti Uang Persediaan (GUP)

Ganti Uang Persediaan Tunai dipergunakan untuk keperluan membiayai operasional sehari-hari Satker dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS. UP Tunai diwajibkan untuk melakukan penggantian (revolving) minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. Hingga bulan Agustus Tahun 2023 terdapat penggantian GUP Tunai sebanyak 62 SPM dengan total **Rp.4,113,065,837,-** untuk seluruh kabupaten/kota (non satker) dan provinsi sebagai berikut:

| NO | NO SPP | NO SPM | NO SP2D         | NILAI SP2D   |
|----|--------|--------|-----------------|--------------|
| 1  | 00034T | 00034A | 230501302000240 | Rp99,985,501 |
| 2  | 00029T | 00029A | 230501302000225 | Rp25,172,938 |
| 3  | 00035T | 00035A | 230501302000246 | Rp33,815,190 |
| 4  | 00038T | 00038A | 230501302000268 | Rp49,968,269 |
| 5  | 00041T | 00041A | 230501302000287 | Rp30,635,736 |
| 6  | 00051T | 00051A | 230501302000454 | Rp99,896,572 |
| 7  | 00062T | 00062A | 230501302000466 | Rp37,053,189 |
| 8  | 00072T | 00072A | 230501302000595 | Rp42,328,500 |
| 9  | 00078T | 00078A | 230501302000645 | Rp46,016,500 |
| 10 | 00095T | 00095A | 230501302000704 | Rp99,996,722 |
| 11 | 00112T | 00112A | 230501302000880 | Rp42,427,461 |
| 12 | 00118T | 00118A | 230501302000960 | Rp42,444,312 |
| 13 | 00120T | 00120A | 230501302000923 | Rp99,834,715 |
| 14 | 00143T | 00143A | 230501302001152 | Rp43,997,157 |
| 15 | 00144T | 00144A | 230501302001124 | Rp29,073,601 |
| 16 | 00153T | 00153A | 230501302001180 | Rp99,965,670 |

|    |        |        |                 |              |
|----|--------|--------|-----------------|--------------|
| 17 | 00154T | 00154A | 230501302001248 | Rp49,999,323 |
| 18 | 00197T | 00197A | 230501302001663 | Rp49,959,100 |
| 19 | 00198T | 00198A | 230501302001811 | Rp31,862,026 |
| 20 | 00201T | 00201A | 230501302001664 | Rp99,965,421 |
| 21 | 00217T | 00217A | 230501302002021 | Rp49,999,680 |
| 22 | 00223T | 00223A | 230501302002022 | Rp49,744,996 |
| 23 | 00257T | 00257A | 230501302002385 | Rp99,893,643 |
| 24 | 00258T | 00258A | 230501302002435 | Rp32,781,343 |
| 25 | 00264T | 00264A | 230501302002448 | Rp34,707,098 |
| 26 | 00275T | 00275A | 230501302002529 | Rp47,957,891 |
| 27 | 00301T | 00301A | 230501302002719 | Rp42,065,186 |
| 28 | 00335T | 00335A | 230501302003000 | Rp49,025,000 |
| 29 | 00345T | 00345A | 230501302003293 | Rp49,895,474 |
| 30 | 00361T | 00361A | 230501302003408 | Rp44,869,569 |
| 31 | 00362T | 00362A | 230501302003426 | Rp48,043,258 |
| 32 | 00363T | 00363A | 230501302003418 | Rp99,902,645 |
| 33 | 00407T | 00407A | 230501302003597 | Rp39,581,300 |
| 34 | 00409T | 00409A | 230501302003924 | Rp49,999,093 |
| 35 | 00417T | 00417A | 230501302004036 | Rp27,620,512 |
| 36 | 00437T | 00437A | 230501302004102 | Rp99,997,608 |
| 37 | 00441T | 00441A | 230501302004150 | Rp50,000,000 |
| 38 | 00442T | 00442A | 230501302004151 | Rp30,133,006 |
| 39 | 00452T | 00452A | 230501302004447 | Rp45,708,851 |
| 40 | 00457T | 00457A | 230501302004448 | Rp42,716,610 |
| 41 | 00488T | 00488A | 230501302004624 | Rp99,965,797 |
| 42 | 00509T | 00509A | 230501302004918 | Rp48,505,732 |
| 43 | 00523T | 00523A | 230501302004986 | Rp89,478,948 |
| 44 | 00524T | 00524A | 230501302005028 | Rp49,858,114 |
| 45 | 00539T | 00539A | 230501302005283 | Rp32,364,729 |
| 46 | 00552T | 00552A | 230501302005543 | Rp28,471,727 |
| 47 | 00573T | 00573A | 230501302005671 | Rp32,689,373 |
| 48 | 00580T | 00580A | 230501302005724 | Rp44,164,197 |

|              |        |        |                 |                           |
|--------------|--------|--------|-----------------|---------------------------|
| 49           | 00592T | 00592A | 230501302005946 | Rp45,403,558              |
| 50           | 00597T | 00597A | 230501302005947 | Rp99,654,183              |
| 51           | 00598T | 00598A | 230501302005966 | Rp37,976,996              |
| 52           | 00619T | 00619A | 230501302006280 | Rp99,963,905              |
| 53           | 00628T | 00628A | 230501302006520 | Rp35,976,845              |
| 54           | 00649T | 00649A | 230501302006619 | Rp49,619,814              |
| 55           | 00657T | 00657A | 230501302006716 | Rp47,021,100              |
| 56           | 00661T | 00661A | 230501302006776 | Rp68,022,853              |
| 57           | 00670T | 00670A | 230501302007012 | Rp48,590,976              |
| 58           | 00674T | 00674A | 230501302007087 | Rp37,521,862              |
| 59           | 00680T | 00680A | 230501302007036 | Rp49,923,878              |
| 60           | 00690T | 00690A | 230501302007138 | Rp99,931,403              |
| 61           | 00717T | 00717A | 230501302007484 | Rp99,997,019              |
| 62           | 00722T | 00722A | 230501302007542 | Rp28,785,880              |
| 63           | 00730T | 00730A | 230501302007634 | Rp49,567,263              |
| 64           | 00736T | 00736A | 230501302007742 | Rp44,436,389              |
| 65           | 00738T | 00738A | 230501302007743 | Rp43,382,541              |
| 66           | 00740T | 00740A | 230501302007870 | Rp49,209,980              |
| 67           | 00742T | 00742A | 230501302008074 | Rp49,999,800              |
| 68           | 00748T | 00748A | 230501302008161 | Rp49,622,880              |
| 69           | 00760T | 00760A | 230501302008268 | Rp55,435,093              |
| 70           | 00768T | 00768A | 230501302008391 | Rp49,999,820              |
| 71           | 00775T | 00775A | 230501302008463 | Rp26,894,504              |
| 72           | 00777T | 00777A | 230501302008465 | Rp48,379,500              |
| 73           | 00780T | 00780A | 230501302008464 | Rp48,223,438              |
| 74           | 00783T | 00783A | 230501302008530 | Rp99,947,140              |
| 75           | 00793T | 00793A | 230501302008586 | Rp35,037,934              |
| <b>TOTAL</b> |        |        |                 | <b>Rp.4,113,065,837,-</b> |

Berbeda dengan GUP Tunai, GUP KKP tidak terdapat ketentuan jumlah minimal dalam melakukan penggantian uang persediaan/revolving. Berikut merupakan realisasi dari Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Bawaslu Provinsi Gorontalo sampai Agustus Tahun 2023.

| No | No. SPP & SPM | Tanggal SPP | Tanggal SPM | No. SP2D | Tanggal SP2D | Nilai SP2D |
|----|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|
|----|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|

|    |                         |                        |                     |                     |                        |              |
|----|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1  | 00097T<br>dan<br>00097A | 13<br>Februari<br>2023 | 13 Februari<br>2023 | 23050130<br>2000706 | 13<br>Februari<br>2023 | Rp47.038.328 |
| 2  | 00116T<br>dan<br>00116A | 17<br>Februari<br>2023 | 17 Februari<br>2023 | 23050130<br>2000881 | 20<br>Februari<br>2023 | Rp52.633.942 |
| 3  | 00171T<br>dan<br>00171A | 3 Maret<br>2023        | 6 Maret<br>2023     | 23050130<br>2001440 | 6 Maret<br>2023        | Rp66.256.659 |
| 4  | 00219T<br>dan<br>00219A | 16<br>Maret<br>2023    | 16 Maret<br>2023    | 23050130<br>2001999 | 17<br>Maret<br>2023    | Rp64.697.890 |
| 5  | 00299T<br>dan<br>00299A | 5 April<br>2023        | 5 April<br>2023     | 23050130<br>2002646 | 6 April<br>2023        | Rp67.182.627 |
| 6  | 00378T<br>dan<br>00378A | 2 Mei<br>2023          | 3 Mei 2023          | 23050130<br>2003534 | 4 Mei<br>2023          | Rp47.111.710 |
| 7  | 00516T<br>dan<br>00516A | 6 Juni<br>2023         | 6 Juni 2023         | 23050130<br>2004814 | 6 Juni<br>2023         | Rp68.553.651 |
| 8  | 00550T<br>dan<br>00550A | 15 Juni<br>2023        | 15 Juni<br>2023     | 23050130<br>2005412 | 16 Juni<br>2023        | Rp11.765.368 |
| 9  | 00554T<br>dan<br>00554A | 19 Juni<br>2023        | 19 Juni<br>2023     | 23050130<br>2005550 | 21 Juni<br>2023        | Rp78.369.959 |
| 10 | 00603T<br>dan<br>00603A | 27 Juni<br>2023        | 4 Juli 2023         | 23050130<br>2006104 | 4 Juli<br>2023         | Rp28.139.020 |
| 11 | 00658T<br>dan<br>00658A | 14 Juli<br>2023        | 14 Juli<br>2023     | 23050130<br>2006717 | 17 Juli<br>2023        | Rp22.092.121 |
| 12 | 00659T<br>dan<br>00659A | 17 Juli<br>2023        | 17 Juli<br>2023     | 23050130<br>2006764 | 17 Juli<br>2023        | Rp94.129.332 |
| 13 | 00694T<br>dan<br>00694A | 31 Juli<br>2023        | 31 Juli<br>2023     | 23050130<br>2007212 | 1<br>Agustus<br>2023   | Rp25.953.922 |
| 14 | 00711T<br>dan<br>00711A | 3<br>Agustus<br>2023   | 4 Agustus<br>2023   | 23050130<br>2007483 | 4<br>Agustus<br>2023   | Rp7.416.044  |
| 15 | 00739T<br>dan<br>00739A | 10<br>Agustus<br>2023  | 11 Agustus<br>2023  | 23050130<br>2007859 | 14<br>Agustus<br>2023  | Rp66.475.890 |

|                        |                         |                       |                    |                     |                         |                          |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 16                     | 00753T<br>dan<br>00753A | 22<br>Agustus<br>2023 | 22 Agustus<br>2023 | 23050130<br>2008205 | 23<br>Agustus<br>2023   | Rp39.205.643             |
| 17                     | 00784T<br>dan<br>00784A | 30<br>Agustus<br>2023 | 30 Agustus<br>2023 | 23050130<br>2008531 | 1<br>Septemb<br>er 2023 | 49.483.155               |
| <b>Total Realisasi</b> |                         |                       |                    |                     |                         | <b>Rp. 836.505.261,-</b> |

### 3) Rekening Dana Pemilu (RDP)

Rekening Dana Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah rekening pemerintah lainnya pada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menampung dana Pemilu yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pada Badan Adhoc Penyelenggaran Pemilu. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengajukan LS RDP untuk keperluan Operasional Pemilu. Bawaslu Provinsi Gorontalo sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 telah mengajukan SPM LS RDP sebanyak 21 SPM dengan total SPM sebesar **Rp10.884.181.389,-**.

Untuk Realisasi Belanja Modal (53) di Bawaslu Provinsi Gorontalo hingga Agustus Tahun 2023 adalah sebesar Rp.135,050,00,-. Hingga Agustus Tahun 2023 Pembelian Peralatan dan Mesin untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

- i. Sofa 2 unit = Rp.25,750,000,-
- ii. Kursi Pimpinan 6 unit = Rp.24.000,000,-
- iii. Kursi Rapat Pimpinan 6 unit = Rp.18,000,000,-
- iv. AC 1 unit = Rp.8,300,000,-
- v. PC All In One 1 unit = Rp.15,000,000,-
- vi. Laptop 2 unit = Rp.44.000,000,-

d. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Agustus Tahun 2023 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo disampaikan sebagai berikut:

| Kode Satker | Satker                                 | Nilai IKPA |
|-------------|--|------------|
| 686438      | Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo | 94.00      |

### 2. Permasalahan

- a. Kegiatan yang tidak sesuai pola target penyerapan periodik;
- b. Keterbatasan personel sehingga menghambat proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran;
- c. Kegiatan tidak dapat dilakukan karena masih menunggu petunjuk teknis dari Eselon I.
- d. Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengalami kekurangan anggaran pada berbagai komponen kegiatan yaitu pada komponen kegiatan Gaji Pegawai, Honorarium Pengawas Ad-Hoc, Sewa Gedung Kantor Pengawas Ad-Hoc, Operasional Kantor Pengawas Ad-Hoc dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:
  - Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kekurangan kebutuhan anggaran belanja pegawai sebesar **Rp2.219.269.000,-**;
  - Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kekurangan kebutuhan anggaran Honorarium Pengawas Ad-Hoc sebesar **Rp5.383.600.000,-**;
  - Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kekurangan kebutuhan anggaran Sewa Gedung Kantor Pengawas Ad-Hoc sebesar **Rp1.535.400.000,-**;

- Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kekurangan kebutuhan anggaran Operasional Kantor Pengawas Ad-Hoc sebesar **Rp759.960.000,-**.
- e. Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 10 Juli Tahun 2023 dan Pertanggal 31 Juli Tahun 2023 sudah masuk dana hibah pada Rekening Penampung Hibah sebesar 40% dari total Anggaran sebesar Rp. 24,126,132,000,-.
3. Rencana Tindak Lanjut
    - a. Melakukan revisi kalender kegiatan (timeline) dan penyesuaian perencanaan program/kegiatan;
    - b. Kolaborasi atau bekerjasama dengan bagian lain agar lebih maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan tercapainya percepatan realisasi;
    - c. Mengidentifikasi kegiatan dan melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI dan menyampaikan kebutuhan yang jelas terkait petunjuk yang dibutuhkan agar kegiatan dapat dilanjutkan tanpa hambatan pada periode yang akan datang.
    - d. Program pengembangan pengawasan partisipatif menjadi salah satu program nasional, dan menjadi program unggulan di Bawaslu Kabupaten Boalemo. Program ini melibatkan para pemangku kepentingan yang potensial menjadi penggerak pengawasan partisipatif di daerah. Untuk itu, sebaiknya penganggaran untuk program ini agar lebih di Optimalkan.
    - e. Terdapat sejumlah kegiatan teknis di Bawaslu Kabupaten Boalemo yang membutuhkan keterlibatan pihak eksternal. Namun kurang didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Untuk itu, sebaiknya program/kegiatan yang memungkinkan pemanfaatan tenaga eksternal terakomodasi dalam penganggaran DIPA Bawaslu.
    - f. Satker Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menyampaikan kekurangan anggaran kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu Republik Indonesia.

### **C. Barang Milik Negara (BMN)**

1. Analisis Data (Data Sarana berupa Gedung Kantor dan Prasarana berupa Peralatan Kantor Beserta Kondisi dan Analisa Kebutuhan)

Bawaslu Provinsi Gorontalo saat ini menempati Gedung Pinjam Pakai dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2025. Gedung saat ini dalam kondisi rusak ringan dan perlu dilakukan perbaikan di berbagai ruangan di dalam gedung kantor. Saat ini Komisioner dan Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, serta staf terpenuhi untuk kebutuhan ruangan kerja. Termasuk juga untuk Ruang Sidang yang merangkap sebagai Ruang Rapat. Untuk Barang Milik Negara secara umum telah terpenuhi kebutuhan namun perlu dilakukan peremajaan terhadap BMN yang sudah dianggap ketinggalan jaman. Beberapa BMN juga perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk dapat menunjang pekerjaan sehingga anggaran perawatan dan perbaikan sangat penting untuk terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2023 Bawaslu Kota Gorontalo memperoleh Gedung Pinjam pakai dari Pemerintah Kota Gorontalo yang beralamatkan di Jln Taman Bunga, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur. Kondisi gedung masih membutuhkan perbaikan dan tambahan ruangan, seperti belum tersedianya ruangan Rapat dan Ruang untuk Sidang.

2. Permasalahan
  - a. Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo yang masih berstatus Pinjam Pakai;
  - b. Terdapat banyak BMN yang perlu dilakukan peremajaan dikarenakan sudah tidak mampu untuk digunakan dalam bekerja;
  - c. Anggaran Pemeliharaan BMN tidak mencukupi kebutuhan perawatan dan perbaikan BMN di kantor Bawaslu Prov. Gorontalo.
  - d. Belum tersedianya anggaran untuk perbaikan gedung pada Bawaslu Kota Gorontalo.

- e. Belum tersedianya anggaran untuk penambahan ruangan Sidang dan Rapat pada Bawaslu Kota Gorontalo.
  - f. Karena belum menjadi Satker maka Bawaslu Kota Gorontalo terkendala dengan Pengadaan Barang dan Jasa Penunjang pekerjaan.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a. Mengajukan permohonan pembangunan Gedung Kantor atas Tanah Hibah Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Republik Indonesia;
  - b. Membuat usulan anggaran peremajaan terhadap BMN yang masih dapat dilakukan pengembangan, serta melakukan penghapusan terhadap BMN yang sudah tidak dapat lagi dilakukan perbaikan maupun peremajaan;
  - c. Melakukan pengusulan tambahan anggaran perawatan dan perbaikan bagi BMN yang perlu dilakukan perawatan berkala seperti AC, Printer, dll.
  - d. Dalam hal ini Bawaslu Kota Gorontalo sudah melakukan konsultasi dengan BMN Bawaslu Provinsi Gorontalo, terkait dengan kekurangan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Kantor Penunjang pekerjaan.

#### **D. Hukum Bidang Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)**

1. Analisis Data (Pengelolaan JDIH. Sosialisasi terkait Surat Edaran. Perbawaslu. dst)
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 (Perpres 33/2012) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Oleh karena itu keberadaan JDIH Bawaslu merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Dalam pelaksanaan pengelolaan produk hukum dengan baik, Bawaslu bersama dengan jajaran dibawahnya melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dilengkapi dengan perangkat organisasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum. Fungsi tersebut selama ini dilaksanakan melalui JDIH Bawaslu yang memanfaatkan teknologi informasi, oleh Pusat JDIH Bawaslu RI dan Anggota JDIH Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam JDIH Bawaslu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Oleh karenanya menjaga standar kualitas pengelolaan JDIH Bawaslu akan menjaga standar kualitas dan menjadikan produk hukum di Bawaslu otentik, utuh dan terpercaya, sehingga dapat mencapai Visi dan misi yang sebelumnya telah dijabarkan dan tentunya dapat membantu meningkatkan nilai reformasi birokrasi terutama di Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan JDIH mempedomani Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi yang menjadi acuan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam

meningkatkan kegiatan pengelolaan JDIH Bawaslu dengan memperhatikan standar pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perbawaslu 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum yang terintegrasi untuk mendukung kinerja pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.

a) Struktur Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bahwa dalam rangka terlaksananya pengelolaan JDIH yang secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat, maka dalam hal ini Bawaslu Provinsi Gorontalo membentuk struktur tim pengelola JDIH di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor : 080/HK.01.01/K/10/2022 yakni sebagai berikut:

**Tabel Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo**

| NO  | NAMA                        | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|--|---------------------|
| 1.  | Idris Usuli                 | Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo                             | Pembina             |
| 2.  | Lismawy Ibrahim             | Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo                           | Pembina             |
| 3.  | John Hendri Purba           | Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo                           | Pembina             |
| 4.  | Amin Abdullah               | Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo                           | Pembina             |
| 5.  | Moh Vadzry Arsyad           | Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo                           | Pembina             |
| 6.  | Nikson Entengo              | Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo                           | Penanggung Jawab    |
| 7.  | Yusnandar Karim             | Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa. | Ketua               |
| 8.  | Rahadian Herlangga Wisnu W. | Koordinator Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses.   | Sekretaris          |
| 9.  | Johan Robbi Mahfuz Z.       | Analisis Hukum Ahli Pertama                                  | Anggota             |
| 10. | Moh. Adib Mustofa           | Pelaksana Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses      | Anggota             |

**Gambar : SK Nomor: 080/H.K.01.01/K/10/2022**



b) Ruang JDIH Bawaslu

Dalam menunjang pengelolaan produk hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyediakan ruangan khusus untuk Pengelolaan JDIH yang bertempat di Kantor Bawaslu Bawaslu Provinsi Gorontalo.



Keterangan

- 1) Ruang Khusus JDIH
- 2) Perpustakaan
- 3) Fasilitas Ruang JDIH
- 4) Ruang Operator JDIH

c) Pengelolaan Dokumen Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan JDIH melakukan pembaharuan (update) jumlah koleksi dokumen hukum pada JDIH Bawaslu setiap saat, dengan jenis dokumen hukum berupa:

- 1) Putusan Penyelesaian Sengketa;
- 2) Surat Keputusan;
- 3) Surat Edaran;
- 4) Nota Kesepahaman;
- 5) Perjanjian Kerja Sama;
- 6) Imbauan.

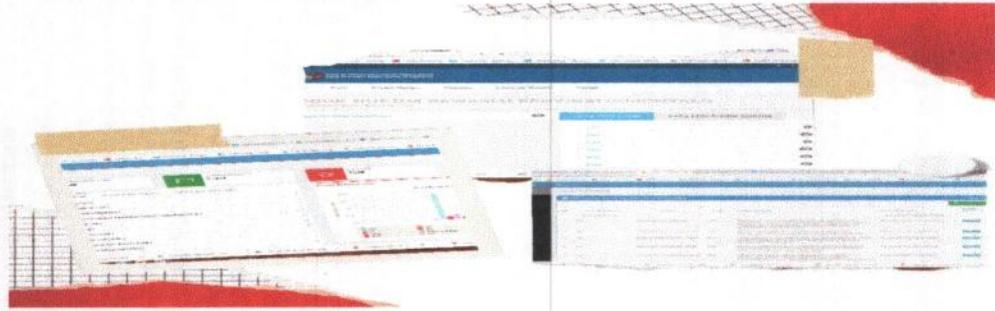


Sebelum melakukan unggah dokumen hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo pada JDIH Bawaslu, terlebih dahulu berdasarkan Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 yaitu :

- 1) Menyusun abstrak produk hukum yang diunggah pada JDIH, bahwa abstrak yang disusun berlaku hanya untuk dokumen hukum jenis putusan.
- 2) Memberikan tanda dalam kertas (watermark) pada dokumen Hukum yang diunggah ke dalam sistem JDIH Bawaslu, bahwa sebelum dokumen yang akan diunggah ke dalam JDIH Bawaslu, terlebih dahulu memberikan tanda watermark dengan tujuan untuk melindungi hak cipta atau copyright sebuah karya. Dengan adanya watermark publik mengetahui bahwa karya tersebut benar-benar milik Bawaslu Provinsi Gorontalo. Jadi, tidak ada orang lain yang berhak menyatakan bahwa karya

tersebut adalah milik mereka. Pemberian watermark dengan ketentuan (ukuran huruf 12 jenis huruf arial dan pojok kiri dan kanan bawah dokumen dari halaman 2 sampai dengan seterusnya terdapat penggunaan kata [jdih://bawaslu.go.id](http://jdih://bawaslu.go.id) dan Bawaslu Provinsi Gorontalo menggunakan warna huruf biru.

- 3) Jumlah Dokumen Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo yang telah diunggah pada JDIH Bawaslu sebanyak 78 dokumen hukum yang terdiri dari Putusan Penyelesaian Sengketa sebanyak 2, Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi sebanyak 4, Putusan Pidana Pemilu sebanyak 1, Perjanjian Kerjasama Sebanyak 13, Nota Kesepahaman Sebanyak 2, Surat Keputusan sebanyak 56 Dokumen.



- 4) Sosialisasi JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo dilakukan melalui Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok), tujuan agar masyarakat lebih mudah dan cepat untuk menerima informasi karena dengan media sosial bisa menjadi sarana sosialisasi yang murah dan efektif bagi instansi pemerintah khususnya lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan produk hukum Bawaslu. Berikut media sosial JDIH Bawaslu Provinsi Gorontalo



## 2. Permasalahan

- a) Anggaran Divisi Hukum setiap tahunnya tidak dapat mengakomodir untuk dilakukannya Sosialisasi seluruh Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu sehingga setiap tahun kegiatan sosialisasi terkait Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dan Peraturan Bawaslu menjadi sangat terbatas.
- b) Kurangnya Personil SDM Divisi Hukum yang menjadi Hambatan Divisi Hukum dalam melakukan (Program Pengelolaan JDIH, Sosialisasi terkait Surat Edaran, Perbawaslu dsb).
- c) Pengelolaan Dokumen Hukum masih belum teratur dikarenakan kurangnya Personil di Divisi Hukum.

- d) Sarana Prasarana yang belum memadai, di Divisi Hukum belum ada Komputer dan Scanner yang khusus digunakan untuk mengelola Dokumen Hukum yang akan di Upload di JDIIH.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a) Memanfaatkan resource yang ada di Divisi Hukum se-efisien mungkin. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada di Divisi Hukum dengan adanya pembagian Tugas secara tepat akan memudahkan prosedur pengelolaan JDIIH di Bawaslu Provinsi Gorontalo.
  - b) Melakukan Pengajuan terhadap Pengadaan Laptop kantor, Scanner, dan Lemari untuk Mengelola Dokumen Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo.

#### **E. Pengelolaan Data dan Informasi (Datin)**

##### **1. Analisis Data (Pengelolaan Website PPID)**

Tanggal 18 bulan juli 2023 Data dan informasi (Datin) telah melaksanakan/berpartisipasi dalam penguatan kelembagaan berupa kegiatan sosialisasi monev keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bawaslu secara daring. Tanggal 24 s.d 25 juli Mengikuti Kegiatan Transfer Knowledge Software Devined Wide Area Network (SD-WAN) yang dilaksanakan di Jakarta kemudian Bawaslu memberikan Sangfor kepada Bawaslu Provinsi yang kegunaannya adalah untuk security jaringan serta untuk mengakses data kependudukan di kementerian dalam negeri alat sangfor tersebut sudah terpasang dan aktif hanya tinggal menunggu petunjuk penggunaannya.

Selang semester I (satu) Data dan informasi telah melaksanakan/berpartisipasi dalam penguatan kelembagaan Datin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain : tentang mengikuti Rapat Penyusunan Instrument Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2023 (luring), Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Public (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten Kota (daring) Monitoring dan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Public (KIP) (luring), Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Aplikasi SAQ dalam penilaian Layanan Informasi Publik (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota (luring), Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SAQ di Bawaslu Kabupaten/Kota (daring), Sosialisasi Keamanan dan Kebersihan Siber dilingkungan Bawaslu (luring), Rapat Evaluasi Pelaksanaan Monev Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Public (KIP)(luring), Mengikuti Kegiatan Transfer Knowledge Software Devined Wide Area Network (SD-WAN).

Tim Data dan Informasi Bawaslu Provinsi telah mengupload dokumen permintaan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Pusdatin RI telah mengupload dokumen permintaan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu Republik Indonesia terkait penilaian Keterbukaan Informasi Publik. Langkah ini menunjukkan komitmen dari Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik kepada masyarakat. Dokumen permintaan yang diunggah ini berisi data dan informasi terkait tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Gorontalo, laporan kegiatan, anggaran, serta segala hal yang dapat memberikan gambaran tentang keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi Gorontalo.

##### **2. Permasalahan**

Terhadap pengelolaan website PPID yang merupakan penyedia layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Gorontalo maupun Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat kendala sebagai berikut :

- a) Tidak semua SDM yang memiliki basik IT dalam Pengelolaan Data dan Informasi baik di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b) Perlu dilakukan penguatan secara kontinyu dan konsisten terhadap pemahaman SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa Informasi adalah merupakan

hak dasar dari masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga harus selalu tersedia secara berkala.

- c) Server Website Kabupaten/Kota yang sering error/maintenance serta tidak aman dari serangan Hacker.
  - d) Setiap hari signal tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya kerja-kerja lembaga ditambah lagi dengan struktur gedung Bawaslu Provinsi 3 (tiga) lantai.
3. Rencana Tindak Lanjut
- a) Memasukkan anggaran khusus pembaharuan alat dan jaringan internet pada perencanaan anggaran tahun 2024
  - b) Meningkatkan kapasitas pengelola layanan Data dan Informasi di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - c) Memasang Sangfor/alat security jaringan yang telah di berikan oleh Bawaslu RI (Pusdatin).

## **F. Pengelolaan Hubungan Masyarakat (Humas)**

### **1. Analisis Kehumasan**

Pengelolaan kehumasan berfokus pada 2(dua) hal yaitu pengelolaan publikasi berita melalui website dan pengelolaan media sosial melalui Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, dan Youtube.

Pada bulan Juli divisi humas telah melaksanakan dan mengikuti beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan publikasi dan dokumentasi Lembaga Bawaslu. Adapun ringkasanya adalah sebagai berikut:

#### **a) Pengelolaan Media Sosial**

##### **• Instagram**

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Instagram @bawaslugorontalo berjumlah 78 unggahan. Jumlah followers instagram pada bulan ini naik dari 2.034 menjadi 2.067, dimana bertambah sebanyak 33 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 2.908 akun.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Instagram @bawaslugorontalo berjumlah 75 unggahan. Jumlah followers instagram pada bulan ini naik dari 2.067 menjadi 2.102, dimana bertambah sebanyak 45 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 2.149 akun.

##### **• Facebook**

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Facebook @bawaslugorontalo berjumlah 78 unggahan. Jumlah pengikut Facebook pada bulan ini naik dari 2.495 menjadi 2.526, dimana bertambah sebanyak 31 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 4.142 akun.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Facebook @bawaslugorontalo berjumlah 75 unggahan. Jumlah pengikut Facebook pada bulan ini naik dari 2.526 menjadi 2.595, dimana bertambah sebanyak 69 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 5.199 akun.

##### **• Twitter**

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Twitter @bawaslugtlo berjumlah 78 unggahan. Jumlah pengikut Twitter pada bulan ini naik dari 247 menjadi 248, dimana bertambah sebanyak 1 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 2.206 akun.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Twitter @bawaslugtlo berjumlah 75 unggahan. Jumlah pengikut Twitter pada bulan ini

naik dari 248 menjadi 255, dimana bertambah sebanyak 7 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian jangkauan sebanyak 1.632 akun.

- Tiktok

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Tiktok @bawaslugorontalo berjumlah 9 unggahan. Jumlah pengikut Tiktok pada bulan ini naik dari 834 menjadi 868, dimana bertambah sebanyak 34 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian tayangan sebanyak 2.165 akun.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Tiktok @bawaslugorontalo berjumlah 9 unggahan. Jumlah pengikut Tiktok pada bulan ini naik dari 868 menjadi 913, dimana bertambah sebanyak 45 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian tayangan sebanyak 2.465 akun.

- Youtube

Selama periode 1 - 31 Juli 2023, total unggahan di Youtube Bawaslu Gorontalo berjumlah 9 unggahan. Jumlah pengikut Youtube pada bulan ini naik dari 348 menjadi 366, dimana bertambah sebanyak 34 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian tayangan sebanyak 5.600 penayangan.

Selama periode 1 - 31 Agustus 2023, total unggahan di Youtube Bawaslu Gorontalo berjumlah 4 unggahan. Jumlah pengikut Youtube pada bulan ini naik dari 366 menjadi 377, dimana bertambah sebanyak 11 orang. Dari keseluruhan unggahan berhasil menarik perhatian tayangan sebanyak 1.314 penayangan.

- b) Pengelolaan Berita Website

Selama Periode 1 – 31 Juli 2023, total dilihat halaman adalah 24.084 kali, dengan total pengunjung website sebanyak 2.857 orang.

Selama Periode 1 – 31 Agustus 2023, total dilihat halaman adalah 24.027 kali, dengan total pengunjung website sebanyak 2.677 orang.

2. Permasalahan

- a) Kurangnya Sarana dan prasarana Kehumasan sehingga memiliki keterbatasan dalam mengambil gambar dan video.
- b) Jumlah tenaga SDM tidak sebanding dengan jumlah kegiatan yang diharuskan untuk dibuat konten dan berita.

3. Rencana Tindak Lanjut

- a) Memaksimalkan Penggunaan Perangkat yang ada.
- b) Menggunakan Tenaga Teknis di masing-masing Divisi sebagai pencatatan berita kegiatan yang dilaksanakan agar berita dan konten bisa di upload dengan cepat dan akurat.

# Lampiran Laporan Kinerja

## A. Aspek Kepegawaian SDM

### 1. Data Umum Kepegawaian PNS Bawaslu Provinsi Gorontalo

| NO | NAMA                             | NIP                | STATUS  |     | PANGKAT/GOL | PANGKAT/GOLONGAN | TMT  | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN                                  | RUMAH AT DIKLAT PIM | TMT GAJI BERKALA                | PEJABAT PENANGGUNGJAWAB BERKALA TERAKHIR |
|----|----------------------------------|--------------------|---------|-----|-------------|------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|--|
|    |                                  |                    | ORGANIK | DKR |             |                  |  |                     |  |                     |                                 |  |
| 1  | NIKSON ENTENGO                   | 197911222002121008 | ORGANIK |     | IV/b        | 01-04-2021       | S-2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN      | STRUKTURAL          | SPAMEN/SESPA/SESPAN AS DIKLAT PIM TK. II | 01-12-2021          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 2  | FERDY RUS MODANGGU               | 196907172002121007 | ORGANIK |     | III/d       | 01-10-2012       | S-1 SOSIAL POLITIK                           | STRUKTURAL          | SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV             | 01-12-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 3  | YUSNANDAR KARIM                  | 197801202002121008 | ORGANIK |     | III/d       | 01-04-2017       | S-1 HUKUM ISLAM                              | STRUKTURAL          | SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV             | 01-10-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 4  | ADMIRA NURINDAH NINGRUM WANTOGIA | 197804152006042027 | ORGANIK |     | III/d       | 01-10-2016       | S-1 EKONOMI MANAJEMEN KELOMPOK DAN PERBANKAN | STRUKTURAL          | SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV             | 01-01-2021          | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  |
| 5  | MUHAMMAD IKRAR RAUF              | 198411302022031007 | ORGANIK |     | III/a       | 01-03-2022       | S-1 ILMU HUKUM                               | JFT                 | -  | -                   | -                               |  |
| 6  | SITTYANTI S. PAKAYVA             | 197605132009012002 | ORGANIK |     | III/d       | 01-04-2022       | S-1 MIPA KOMPUTER DAN SISTEM INFORMATIKA     | JFT                 | SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV             | 01-01-2021          | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  |
| 7  | ISNAWATI M MARRUN                | 198103092009012003 | ORGANIK |     | III/d       | 01-04-2022       | S-1 ADMINISTRASI                             | JFT                 | SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV             | 01-01-2021          | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  |
| 8  | ISWAN MAKSUM                     | 198210222008021001 | ORGANIK |     | III/c       | 01-10-2019       | S-2 ADMINISTRASI PUBLIK                      | JFT                 | SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV             | 01-02-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 9  | JOHAN ROHH MAHFUS ZHAHRI         | 199610252019021002 | ORGANIK |     | III/a       | 01-02-2019       | S-1 ILMU HUKUM                               | JFT                 | -  | 01-02-2023          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 10 | NURUL FAUZIAH                    | 200005152022012006 | ORGANIK |     | III/c       | 01-01-2022       | D-III AKUNTANSI                              | JFT                 | -  | -                   | -                               |  |
| 11 | NADILA DWI CAHYANI               | 199907202022012002 | ORGANIK |     | III/c       | 01-01-2022       | D-III AKUNTANSI                              | JFT                 | -  | -                   | -                               |  |
| 12 | DEDI SUSANTO                     | 198011102011011001 | ORGANIK |     | III/a       | 01-04-2020       | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA                 | JFU                 | -  | 01-01-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 13 | YOLANDA NON RUSBIN               | 198312142019022001 | ORGANIK |     | III/d       | 01-04-2023       | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN               | JFU                 | -  | 01-02-2023          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 14 | NENENG WIDASARI                  | 199101262020122007 | ORGANIK |     | III/a       | 01-12-2020       | S-1 ILMU HUKUM                               | JFU                 | -  | 01-12-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 15 | IRA PERMATASARI                  | 199101262020122005 | ORGANIK |     | III/a       | 01-12-2020       | S-1 MANAJEMEN                                | JFU                 | -  | 01-12-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 16 | DONNY HANGGOKO HANGGOKO MUKTI    | 199103262020121004 | ORGANIK |     | III/b       | 01-12-2020       | S-1 MATEMATIKA                               | JFU                 | -  | 01-12-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 17 | RAHMAN HERLANGGA WISNU WARDIHANA | 199203082019021002 | ORGANIK |     | III/b       | 01-04-2023       | S-1 ILMU HUKUM                               | JFU                 | -  | 01-02-2023          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 18 | CHAIRUL RIZAL GOBEL              | 199204162019021003 | ORGANIK |     | III/b       | 01-04-2023       | S-1 ILMU HUKUM                               | JFU                 | -  | 01-02-2023          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 19 | MUH. ADIB MUSTOFA                | 199504032020121004 | ORGANIK |     | III/a       | 01-12-2020       | S-1 ILMU HUKUM                               | JFU                 | -  | 01-12-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 20 | RATU VIDYA NUR ANI               | 199511202020122007 | ORGANIK |     | III/a       | 01-12-2020       | S-1 ILMU PEMERINTAHAN                        | JFU                 | -  | 01-12-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 21 | RIFKY HERMAWAN SAMAD             | 199603222020121003 | ORGANIK |     | III/a       | 01-12-2020       | S-1 ILMU PEMERINTAHAN                        | JFU                 | -  | 01-12-2022          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 22 | REYNALDY YUWALINEN PRADANA       | 199608062019021001 | ORGANIK |     | III/b       | 01-04-2023       | S-1 SISTEM INFORMASI                         | JFU                 | -  | 01-02-2023          | SEKRETARIS JENDERAL             |  |
| 23 | SYARIF ALI KHAN                  | 199706122022031003 | ORGANIK |     | III/a       | 01-03-2022       | S-1 ILMU POLITIK                             | JFU                 | -  | -                   | -                               |  |
| 24 | BAMBANG UBRISI                   | 198107032006041011 |         |     | III/b       | 01-04-2013       | S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI                     | JFU                 | -  | 01-04-2014          | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  |
| 25 | MOH. TAUCIK MASISE               | 198310182011011001 |         |     | III/b       | 01-04-2018       | S-1 SISTEM INFORMASI                         | JFU                 | -  | 01-01-2021          | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  |

2. Data Umum Kepegawaian PP/PPN Bawaslu Provinsi Gorontalo

| NO | NAMA                          | NOMOR IDENTITAS<br>PEGAWAI (NIK) | GELAR      | JABATAN   | PENDIDIKAN                   | MASA KERJA       |
|----|-------------------------------|----------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------|
| 1  | DIDIT SUHANDONO               | 3578091201820001                 | S.H        | PROV.B-BAGIAN PENANGANAN<br>PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA<br>PROSES PEMILU, DAN HUKUM - STAF<br>PENANGANAN PELANGGARAN | S-1 ILMU HUKUM               | 4 TAHUN 6 BULAN  |
| 2  | ARMIN NUR                     | 7111012303930003                 | S.H        | PROV.B-BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN<br>HUBUNGAN MASYARAKAT - STAF HUMAS   | S-1 HUKUM                    | 5 TAHUN 1 BULAN  |
| 3  | IBNU A. LAWANI                | 7171062812930001                 | -          | PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF<br>PERENCANAAN  | SMK                          | 5 TAHUN 10 BULAN |
| 4  | ACHMAD POLAMOLO               | 7501011002920002                 | S.E        | PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF<br>KEUANGAN   | S-1 EKONOMI                  | 5 TAHUN 10 BULAN |
| 5  | MUSTIKA HIDAYAT AL<br>ANSHORI | 7502041603910001                 | S.Komm     | PROV.B-BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN<br>HUBUNGAN MASYARAKAT - STAF<br>PENGAWASAN PEMILU                                      | S-1 TEKNIK INFORMATIKA       | 6 TAHUN 10 BULAN |
| 6  | ADITYO SETIAWAN<br>IBRAHIM    | 7503021001900001                 | S.AP       | PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF BMN   | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 8 TAHUN 6 BULAN  |
| 7  | AWAN ABDULLAH                 | 7503153008780001                 | -          | PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF ARSIP<br>DAN PERSURATAN   | PAKET C                      | 8 TAHUN 6 BULAN  |
| 8  | AHMAD ALI                     | 7571030711860001                 | S.Komm     | PROV.B-BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN<br>HUBUNGAN MASYARAKAT - STAF DATIN   | S-1 TEKNIK INFORMATIKA       | 5 TAHUN 10 BULAN |
| 9  | NORPIN AHMAD                  | 7571062104840001                 | S.IP       | PROV.B-BAGIAN ADMINISTRASI - STAF SDM   | S-1 ILMU POLITIK             | 5 TAHUN 10 BULAN |
| 10 | ISMI FEBRINA<br>MUSTAFA       | 7571084902940001                 | S.H        | PROV.B-BAGIAN PENANGANAN<br>PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA<br>PROSES PEMILU, DAN HUKUM - STAF<br>PENANGANAN PELANGGARAN | S-1 ILMU HUKUM               | 4 TAHUN 6 BULAN  |
| 11 | CHALID IBRAHIM                | 7501012910680001                 | -          | DRIVER  | SGO                          | 4 TAHUN 6 BULAN  |
| 12 | RISNA RAHIM                   | 7501016102780001                 | -          | CLEINING SERVICE  | MA                           | 2 TAHUN 1 BULAN  |
| 13 | TAUFIK BIAHIMO                | 7502010202480002                 | -          | DRIVER  | SMA                          | 3 TAHUN 6 BULAN  |
| 14 | SRI YOLANDA KASIM             | 7503016810900001                 | A.Md., Par | PRAMUSAJI   | D-III ILMU PERHOTELAN        | 4 TAHUN 6 BULAN  |
| 15 | NAZIR HARUN                   | 7503062804890002                 | -          | DRIVER  | SMK                          | 4 TAHUN 3 BULAN  |
| 16 | ARIANTO LALYO                 | 7503151408890001                 | S.H.       | SECURTY   | S-1 HUKUM                    | 3 TAHUN 7 BULAN  |
| 17 | REZA KALUKU                   | 75710111712990002                | -          | DRIVER  | SMA                          | 4 TAHUN 0 BULAN  |
| 18 | FERRIYANTO MOBI               | 7571021202910001                 | -          | DRIVER  | SMP                          | 1 TAHUN 8 BULAN  |
| 19 | ISRAFIEL KAI                  | 7571030912960001                 | -          | SECURTY   | SMK                          | 3 TAHUN 6 BULAN  |
| 20 | BUDIYANTO BOLLIO              | 7571052206800004                 | -          | DRIVER  | SLTA                         | 0 TAHUN 7 BULAN  |
| 21 | USMAN AKUBA                   | 7571032108890001                 | -          | CLEINING SERVICE  | SMP                          | 4 TAHUN 6 BULAN  |
| 22 | YAHYA A. WALINELO             | 7501180808930001                 | -          | SECURTY   | SMK                          | 1 TAHUN 8 BULAN  |



**B. Aspek Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

**1. Kondisi Prasarana Gedung Kantor**

| No | Provinsi/Kabupaten/Kota    | Kesesuaian dengan Standar Luas Bangunan (dalam M2) | Kesesuaian Fungsi             |             | Estimasi Kebutuhan Renovasi | Keterangan                |                    |
|----|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
|    |                            |  | Ruang Kerja Kasek dan Anggota | Ruang Rapat |                             | Ketersediaan Ruang Sidang | Status Kepemilikan |
| 1  | Bawastu Provinsi Gorontalo | 598 M2   | Ada                           | Tidak Ada   | 69.496.000                  | Rusak Ringan              | Pinjarm Pakai      |

**2. Kondisi Sarana Peralatan Kantor**

| No | Provinsi/Kabupaten/Kota    | Kondisi PC/Laptop/Notebook |              |             |                  | Jumlah PC/Laptop/Notebook | Kondisi Peralatan Kantor Lainnya |              |             | Jumlah Peralatan Kantor Lainnya |     |
|----|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-----|
|    |                            | Baik                       | Rusak Ringan | Rusak Berat | Penghapusan Aset |                           | Baik                             | Rusak Ringan | Rusak Berat |                                 |     |
| 1  | Bawastu Provinsi Gorontalo | 47                         | 0            | 17          | 0                | 64                        | 361                              | 0            | 69          | 0                               | 430 |

**3. Kebutuhan Sarana Peralatan Kantor pada Provinsi Gorontalo**

| No | Jumlah Eksisting Pegawai | Jumlah PC/Laptop/ Notebook Tersedia dengan Kondisi Baik dan Rusak Ringan (masih bisa dilakukan pemeliharaan) | Kekurangan PC/Laptop/Notebook | Estimasi Harga Pasar PC/Laptop/ Notebook (Rp) Per Unit | Jumlah Printer Tersedia dengan Kondisi Baik dan Rusak Ringan (masih bisa dilakukan pemeliharaan) | Kekurangan Printer/Scanner | Estimasi Harga Pasar Printer/Scanner (Rp) Per Unit |
|----|--------------------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------------|--|
| 1  | 40                       | 47   | 0                             | -  | 31   | 9                          | 3.000.000  |

4. Pengguna Sarana Peralatan Kantor (PC/Laptop/ Notebook) pada Provinsi Gorontalo

| No | Nama Pengguna Sarana Peralatan Kantor  | PC/Laptop/ Notebook<br>(Merk. Model. dan Tahun)                                   | Printer/Scanner<br>(Merk. Model. dan Tahun)           |
|----|--|---|---|
| 1  | Idris Usuli, S.Pd., M.AP.              | 1. Acer Switch Alpha 12 Tahun 2018<br>2. Acer All In One - i5 - 1235U Tahun 2023  | 1. Epson L3110 Tahun 2019                             |
| 2  | Ahmad Abdullah, S.Ag                   | 1. Acer Switch Alpha 12 Tahun 2018  |   |
| 3  | Amin Abdullah                          | 1. Acer Aspire 5 - i5 Tahun 2022  | 1. Epson L360 Tahun 2017                              |
| 4  | Lismawy Ibrahim                        | 1. Acer Aspire 5 - i5 Tahun 2022  |   |
| 5  | John Hendri Purba                      | 1. Acer Aspire 5 - i5 Tahun 2022  |   |
| 6  | Nikson Entengo, S.IP.,M.Si.            | 1. Acer Switch Alpha 12 Tahun 2018  |   |
| 7  | Admira N.N. Wantogia, S.E              | 1. Lenovo Business Tahun 2018   | 1. Epson L3110 Tahun 2018                             |
| 8  | Ferdy Rus Modanggu, S.Sos.             | 1. Acer Aspire 5 A514 - i5 Tahun 2023   |   |
| 9  | Yusnandar Karim, S.HI                  | 1. Acer Aspire 5 A514 - i5 Tahun 2023<br>2. Lenovo IdeaCenter C360 AIO Tahun 2014 |   |
| 10 | Iswan Maksum, S.IP                     | 1. Asus Tahun 2017  | 1. Epson L565 Tahun 2018                              |
| 11 | Isnawati M. Makrun, S AB               | 1. Acer Switch Alpha 12 Tahun 2018<br>2. Acer Aspire 5 A514 - i7 Tahun 2023       | 1. Epson L3110 Tahun 2018                             |
| 12 | Sitiyanti S. Pakaya, S.Kom.            | 1. Dell Inspiron 5368 Tahun 2016  | 1. Epson L3110 Tahun 2019                             |
| 13 | Moh. Taufik Masie, S.Si                |   |   |
| 14 | Ratu Vidya Nur'aini, S.I.P.            | 1. Lenovo Tahun 2015  | 1. Epson L360 Tahun 2017                              |
| 15 | Muhammad Ikrar Rauf, S.H               | 1. HP All In One 22 Tahun 2018  | 1. Epson L360 Tahun 2017                              |
| 16 | Johan Robbi Mahfus Zhafiri, S.H.       |   | 1. Epson L3110 Tahun 2018                             |
| 17 | Rahadian Herlangga Wisnu Wardhana, S.H |   | 1. Epson L3110 Tahun 2018                             |
| 18 | Muh. Adib Mustofa, S.H                 |   | 1. Epson L3110 Tahun 2018                             |
| 19 | Chairul Rizal Gobel, S.H               | 1. HP All In One 22 Tahun 2018  | 1. Epson L360 Tahun 2018                              |
| 20 | Reynaldy Yuarlimen Pradana, S.Kom      | 1. Lenovo Tahun 2019  | 1. Epson L3110 Tahun 2019                             |
| 21 | Rifky Hermawan Samad, S.I.P.           |   |   |
| 22 | Dedi Susanto, S.Sos                    | 1. HP All In One 22 Tahun 2018  | 1. Epson L3110 Tahun 2019                             |
| 23 | Syarif Ali Khan, S.IP                  | 1. HP All In One 22 Tahun 2018<br>2. Asus A455 L Tahun 2016                       |   |
| 24 | Asni Saipi, S.Sos                      | 1. Asus Tahun 2017  | 1. Epson L3110 Tahun 2018                             |
| 25 | Bambang Urusi, S.Pd                    | 1. HP All In One 22 Tahun 2018  | 1. Epson L455 Tahun 2016                              |
| 26 | Yolanda Non Rosbin, A.Md               | 1. Asus Tahun 2017  | 1. Epson L3210 Tahun 2022                             |
| 27 | Ira Permatasari, S.M.                  | 1. Lenovo Tahun 2019  |   |
| 28 | Donny Hanggoro H. Mukti, S.Si.         |   | 1. Epson L3110 Tahun 2018                             |
| 29 | Nadila Dwi Chayani, A.Md.AK            | 1. Lenovo Business Tahun 2018   |   |
| 30 | Nurul Fauziah, A.Md.AK                 | 1. Lenovo Business Tahun 2018   |   |
| 31 | Adityo Setiawan Ibrahim, S.AP          | 1. Asus Tahun 2017  | 1. Epson L3210 Tahun 2022                             |
| 32 | Achmad Polamolo, S.E                   | 1. Lenovo Tahun 2019  | 1. Epson L565 Tahun 2018                              |
| 33 | Ibnu Lawani                            | 1. Lenovo Tahun 2019  | 1. Epson L3210 Tahun 2022                             |
| 34 | Awan Abdullah                          | 1. Lenovo C360 AIO Tahun 2014   | 1. Epson L565 Tahun 2018<br>2. Epson L5290 Tahun 2022 |
| 35 | Norpin Ahmad, S.IP                     | 1. Lenovo C360 AIO Tahun 2014   | 1. Epson L360 Tahun 2017                              |
| 36 | Armin Nur, S.H                         | 1. Asus Tahun 2017<br>2. HP All-In One 22 Tahun 2018                              | 1. Epson L360 Tahun 2018                              |
| 37 | Ahmad Ali, S.KOM                       | 1. Lenovo C360 AIO Tahun 2014   | 1. Epson L3110 Tahun 2018                             |
| 38 | Mustika Hidayat Al Anshori, S.Kom      | 1. HP All In One 22 Tahun 2018  | 1. Epson L3110 Tahun 2019                             |
| 39 | Ismi F. Mustapa, S.H                   | 1. HP All In One 22 Tahun 2018  | 1. Epson L565 Tahun 2018                              |
| 40 | Didit Suhandono, S.H                   | 1. Asus A455 L Tahun 2016   |   |

5. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) pada Provinsi Gorontalo

| No | Jenis Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) | Kondisi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) |              |             | Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) | Estimasi Kebutuhan Biaya Pemeliharaan (Rp) | Status Kepemilikan |
|----|--|--|--------------|-------------|---|--|--------------------|
|    |  | Baik   | Rusak Ringan | Rusak Berat |   |  |                    |
| 1  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)                    | 10   | 0            | 0           | 10  | 296.240.000                                | Milik Sendiri      |
| 2  | Sepeda Motor   | 4  | 0            | 0           | 4   | -  | Milik Sendiri      |

6. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) pada Provinsi Gorontalo

| No | Nama Pengguna Kendaraan Bermotor       | Jabatan Pengguna Kendaraan Bermotor                                | Roda 4 (empat)       |   | Roda 2 (dua)         |   |
|----|--|--|----------------------|---|----------------------|---|
|    |  |  | Plat Nomor Kendaraan | Jenis Kendaraan (Merk, Model dan Tahun Kendaraan) | Plat Nomor Kendaraan | Jenis Kendaraan (Merk, Model dan Tahun Kendaraan) |
| 1  | Idris Usui, S.Pd., M.AP.               | Ketua  | DM 880               | Innova Venturer 2018                              |                      |   |
| 2  | Ahmad Abdullah, S.Ag                   | Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa                               | DM 884               | Innova Venturer 2018                              |                      |   |
| 3  | Amin Abdullah                          | Kordiv SDM   | DM 883               | Innova Venturer 2018                              |                      |   |
| 4  | Lismawy Ibrahim                        | Kordiv Pencegahan, Partisipasi & Hubungan Masyarakat               | DM 882               | Innova Venturer 2018                              |                      |   |
| 5  | John Hendri Purba                      | Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi                    | DM 881               | Innova Venturer 2018                              |                      |   |
| 6  | Nikson Entengo, S.IP., M.Si            | Kepala Sekretariat   | DM 88                | Innova Venturer 2018                              |                      |   |
| 7  | Admira N.N. Wantogia, S.E              | Kabag Administrasi   | DM 889               | Innova 2013                                       |                      |   |
| 8  | Ferdy Rus Modanggu, S.Sos.             | Kabag Pengawasan   | DM 886               | Innova 2013                                       |                      |   |
| 9  | Yusnandar Karim, S.HI                  | Kabag Hukum  | DM 887               | Innova 2013                                       |                      |   |
| 10 | Isnawati M. Makrun, S AB               | Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara            | DM 885               | Innova 2013                                       |                      |   |
| 11 | Sitiyanti S. Pakaya, S.Kom.            | Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Umum                              |                      |   | DM 6986 AO           | Sepeda Motor Suzuki Ttian 2013                    |
| 12 | Iswan Maksun, S.IP                     | Kasubbag Pengawasan Pemih, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi |                      |   | DM 6998 AO           | Sepeda Motor Suzuki Ttian 2013                    |
| 13 | Nadlia Dwi Chayani, A.Md.AK            | Pranata Keuangan APBN  |                      |   | DM 6916 AS           | Sepeda Motor Suzuki Ttian 2013                    |
| 14 | Rahadian Herlangga Wisnu Wardhana, S.H | Analisis Materi Sidang   |                      |   | DM 6985 AO           | Sepeda Motor Suzuki Ttian 2013                    |

**C. Aspek Keuangan**

1. Data Realisasi Anggaran (sumber data: aplikasi SAKTI laporan *Fa Detail (16 Segmen)*)

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023**

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 **BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**  
 Unit Organisasi: 01 **SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
 Satuan Kerja : 686438 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO**

31 AGUSTUS 2023

| Uraian   | Pagu Revisi           | Realisasi TA 2023     |                | SISA ANGGARAN         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|  |                       | s.d. Periode          | %              |                       |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>   | 49.824.666,000        | 29.819.977,471        | 59,85 %        | 20.004.688,529        |
| <b>CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>  | <b>37,264,426,000</b> | <b>21,080,352,049</b> | <b>56,57 %</b> | <b>16,184,073,951</b> |
| <b>CQ.5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>                   | <b>883,050,000</b>    | <b>520,178,847</b>    | <b>58,91 %</b> | <b>362,871,153</b>    |
| <b>BAH Pelayanan Publik Lainnya</b>  | <b>167,492,000</b>    | <b>88,434,414</b>     | <b>52,80 %</b> | <b>79,057,586</b>     |
| <b>BAH.001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b> | <b>167,492,000</b>    | <b>88,434,414</b>     | <b>52,80 %</b> | <b>79,057,586</b>     |
| 201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)   | 45,246,000            | 39,373,813            | 87,02 %        | 5,872,187             |
| 202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)  | 45,246,000            | 35,204,601            | 77,81 %        | 10,041,399            |
| 301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)  | 38,500,000            | 4,674,000             | 12,14 %        | 33,826,000            |
| 302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)  | 38,500,000            | 9,182,000             | 23,85 %        | 29,318,000            |
| <b>BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga</b>   | <b>33,344,000</b>     | <b>0</b>              | <b>0,00 %</b>  | <b>33,344,000</b>     |
| <b>BDB.001 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif</b>                                  | <b>33,344,000</b>     | <b>0</b>              | <b>0,00 %</b>  | <b>33,344,000</b>     |
| 201 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)                                  | 33,344,000            | 0                     | 0,00 %         | 33,344,000            |
| <b>BKC Pemantauan lembaga</b>  | <b>682,214,000</b>    | <b>431,744,433</b>    | <b>63,29 %</b> | <b>250,469,567</b>    |
| <b>BKC.001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>                  | <b>682,214,000</b>    | <b>431,744,433</b>    | <b>63,29 %</b> | <b>250,469,567</b>    |
| 201 Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)  | 38,965,000            | 38,950,700            | 99,96 %        | 14,300                |
| 202 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)  | 163,010,000           | 162,078,182           | 99,43 %        | 931,818               |
| 203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)   | 57,660,000            | 0                     | 0,00 %         | 57,660,000            |
| 204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)   | 44,239,000            | 39,886,500            | 90,16 %        | 4,352,500             |
| 205 Fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)   | 30,735,000            | 0                     | 0,00 %         | 30,735,000            |
| 301 Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)   | 107,145,000           | 55,691,000            | 51,98 %        | 51,454,000            |
| 302 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)   | 108,520,000           | 68,254,251            | 62,90 %        | 40,265,749            |
| 303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)  | 21,540,000            | 2,550,000             | 11,84 %        | 18,990,000            |
| 304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)  | 40,320,000            | 1,694,900             | 4,20 %         | 38,625,100            |
| 305 Fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)  | 70,080,000            | 62,638,900            | 89,38 %        | 7,441,100             |
| <b>CQ.6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan</b>  | <b>18,296,571,000</b> | <b>7,117,653,799</b>  | <b>38,90 %</b> | <b>11,178,917,201</b> |
| <b>CQ.6661 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</b>   |                       | <b>7,117,653,799</b>  | <b>38,90 %</b> | <b>11,178,917,201</b> |
| <b>QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>   | <b>18,226,571,000</b> | <b>7,058,653,799</b>  | <b>38,73 %</b> | <b>11,167,917,201</b> |
| <b>QIC.001 Fasilitas dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</b>                 | <b>17,592,271,000</b> | <b>6,605,435,549</b>  | <b>37,55 %</b> | <b>10,986,835,451</b> |
| 201 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)  | 12,748,000            | 0                     | 0,00 %         | 12,748,000            |
| 202 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)                       | 62,511,000            | 29,405,000            | 47,04 %        | 33,106,000            |
| 203 Fasilitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)  | 235,958,000           | 151,676,700           | 64,28 %        | 84,281,300            |
| 204 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)  | 361,714,000           | 38,395,800            | 10,61 %        | 323,318,200           |
| 205 Fasilitas dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)  | 592,793,000           | 45,885,000            | 7,74 %         | 546,908,000           |
| 206 Fasilitas dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)   | 56,144,000            | 5,400,000             | 9,62 %         | 50,744,000            |
| 207 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)  | 2,056,632,000         | 1,171,241,383         | 56,95 %        | 885,390,617           |
| 208 Fasilitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)   | 45,568,000            | 32,815,084            | 72,01 %        | 12,752,916            |
| 301 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)   | 150,317,000           | 23,128,000            | 15,39 %        | 127,189,000           |
| 302 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)   | 439,779,000           | 141,743,000           | 32,23 %        | 298,036,000           |
| 303 Fasilitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)   | 2,287,880,000         | 945,199,635           | 41,31 %        | 1,342,680,365         |
| 304 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)   | 1,157,893,000         | 571,113,400           | 49,32 %        | 586,779,600           |
| 305 Fasilitas dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)   | 1,931,080,000         | 455,831,200           | 23,60 %        | 1,475,248,800         |

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
 Unit Organisasi: 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

| Uraian   | Pagu Revisi           | Realisasi TA 2023     |                | SISA ANGGARAN         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|  |                       | s.d. Periode          | %              |                       |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>   | <b>49.824.866,000</b> | <b>29.819.977,471</b> | <b>59,85 %</b> | <b>20.004.688,529</b> |
| 306 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)   | 594.504,000           | 284.005,200           | 47,77 %        | 310.498,800           |
| 307 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)  | 2.968.680,000         | 729.054,847           | 24,56 %        | 2.239.625,153         |
| 308 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)   | 438.230,000           | 189.013,300           | 43,13 %        | 249.216,700           |
| 401 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)  | 1.122.040,000         | 912.228,000           | 81,30 %        | 209.812,000           |
| 402 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)  | 3.077.800,000         | 879.300,000           | 28,57 %        | 2.198.500,000         |
| <b>QIC.003 Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc</b>                                | <b>634.300,000</b>    | <b>453.218,250</b>    | <b>71,45 %</b> | <b>181.081,750</b>    |
| 401 Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)  | 634.300,000           | 453.218,250           | 71,45 %        | 181.081,750           |
| <b>UAB Sistem Informasi Pemerintahan</b>   | <b>70.000,000</b>     | <b>59.000,000</b>     | <b>84,29 %</b> | <b>11.000,000</b>     |
| <b>UAB.001 Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu</b>   | <b>70.000,000</b>     | <b>59.000,000</b>     | <b>84,29 %</b> | <b>11.000,000</b>     |
| 201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)  | 70.000,000            | 59.000,000            | 84,29 %        | 11.000,000            |
| <b>CQ.6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu</b>  | <b>19.834,000</b>     | <b>18.358,500</b>     | <b>92,56 %</b> | <b>1.475,500</b>      |
| <b>QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>   | <b>19.834,000</b>     | <b>18.358,500</b>     | <b>92,56 %</b> | <b>1.475,500</b>      |
| <b>QIC.001 Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu</b>  | <b>19.834,000</b>     | <b>18.358,500</b>     | <b>92,56 %</b> | <b>1.475,500</b>      |
| 203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)                    | 13.600,000            | 13.600,000            | 100,00 %       | 0                     |
| 303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)                   | 6.234,000             | 4.758,500             | 76,33 %        | 1.475,500             |
| <b>CQ.6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc</b>   | <b>12.258.720,000</b> | <b>11.303.411,045</b> | <b>92,21 %</b> | <b>955.308,955</b>    |
| <b>QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>   | <b>12.258.720,000</b> | <b>11.303.411,045</b> | <b>92,21 %</b> | <b>955.308,955</b>    |
| <b>QIC.001 Honorarium Pengawas Ad-Hoc</b>  | <b>6.963.200,000</b>  | <b>6.797.300,000</b>  | <b>97,62 %</b> | <b>165.900,000</b>    |
| 401 Honorarium (Kecamatan)   | 3.804.000,000         | 3.803.100,000         | 99,98 %        | 900,000               |
| 501 Honorarium (Kelurahan/Desa)  | 3.159.200,000         | 2.994.200,000         | 94,78 %        | 165.000,000           |
| <b>QIC.002 Operasional Pengawas Ad-Hoc</b>   | <b>5.295.520,000</b>  | <b>4.506.111,045</b>  | <b>85,09 %</b> | <b>789.408,955</b>    |
| 301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)   | 2.448.360,000         | 2.083.066,908         | 85,08 %        | 365.293,092           |
| 302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)  | 408.000,000           | 225.664,000           | 55,31 %        | 182.336,000           |
| 402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)  | 1.535.400,000         | 1.413.200,000         | 92,04 %        | 122.200,000           |
| 404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)  | 831.960,000           | 712.380,137           | 85,63 %        | 119.579,863           |
| 502 Penanda identitas (Kelurahan/Desa)   | 71.800,000            | 71.800,000            | 100,00 %       | 0                     |
| <b>CQ.6839 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih</b>                              | <b>1.861.360,000</b>  | <b>1.219.149,074</b>  | <b>65,50 %</b> | <b>642.210,926</b>    |
| <b>QCE Penanganan Perkara</b>  | <b>187.800,000</b>    | <b>64.222,374</b>     | <b>34,20 %</b> | <b>123.577,626</b>    |
| <b>QCE.001 Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih</b>                  | <b>187.800,000</b>    | <b>64.222,374</b>     | <b>34,20 %</b> | <b>123.577,626</b>    |
| 202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)  | 54.360,000            | 37.703,824            | 69,36 %        | 16.656,176            |
| 302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota) | 133.440,000           | 26.518,550            | 19,87 %        | 106.921,450           |
| <b>QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>   | <b>1.673.560,000</b>  | <b>1.154.926,700</b>  | <b>69,01 %</b> | <b>518.633,300</b>    |
| <b>QIC.001 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih</b>                              | <b>1.673.560,000</b>  | <b>1.154.926,700</b>  | <b>69,01 %</b> | <b>518.633,300</b>    |
| 201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)    | 8.010,000             | 6.210,000             | 77,53 %        | 1.800,000             |
| 202 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)                              | 30.710,000            | 29.686,000            | 96,67 %        | 1.024,000             |
| 203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)      | 56.540,000            | 10.390,000            | 18,38 %        | 46.150,000            |
| 301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)   | 38.080,000            | 8.909,800             | 23,40 %        | 29.170,200            |
| 302 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)                             | 83.520,000            | 36.416,000            | 43,60 %        | 47.104,000            |
| 303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)     | 357.100,000           | 11.624,900            | 3,26 %         | 345.475,100           |
| 401 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)                             | 668.800,000           | 620.890,000           | 92,84 %        | 47.910,000            |

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
 Unit Organisasi: 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

| Uraian   | Pagu Revisi           | Realisasi TA 2023     |                | SISA ANGGARAN         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|  |                       | s.d. Periode          | %              |                       |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>   | <b>49,624,666,000</b> | <b>29,619,977,471</b> | <b>59.85 %</b> | <b>20,004,688,529</b> |
| 501 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)  | 430,800,000           | 430,800,000           | 100.00 %       | 0                     |
| <b>CQ.6840 Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu</b>   | <b>47,562,000</b>     | <b>47,279,800</b>     | <b>99.41 %</b> | <b>282,200</b>        |
| QCE Penanganan Perkara   | 2,555,000             | 2,555,000             | 100.00 %       | 0                     |
| QCE.001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu   | 2,555,000             | 2,555,000             | 100.00 %       | 0                     |
| 202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)   | 2,555,000             | 2,555,000             | 100.00 %       | 0                     |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  | 45,007,000            | 44,724,800            | 99.37 %        | 282,200               |
| QIC.001 Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu  | 45,007,000            | 44,724,800            | 99.37 %        | 282,200               |
| 201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)   | 300,000               | 300,000               | 100.00 %       | 0                     |
| 202 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)   | 23,585,000            | 23,584,800            | 100.00 %       | 200                   |
| 301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)  | 2,750,000             | 2,750,000             | 100.00 %       | 0                     |
| 302 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)  | 18,372,000            | 18,090,000            | 98.47 %        | 282,000               |
| <b>CQ.6841 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>  | <b>108,316,000</b>    | <b>107,946,800</b>    | <b>99.66 %</b> | <b>369,200</b>        |
| QCE Penanganan Perkara   | 65,260,000            | 65,194,800            | 99.90 %        | 65,200                |
| QCE.001 Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan   | 65,260,000            | 65,194,800            | 99.90 %        | 65,200                |
| 201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)  | 38,160,000            | 38,160,000            | 100.00 %       | 0                     |
| 301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)   | 27,100,000            | 27,034,800            | 99.76 %        | 65,200                |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  | 43,056,000            | 42,752,000            | 99.29 %        | 304,000               |
| QIC.001 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah   | 43,056,000            | 42,752,000            | 99.29 %        | 304,000               |
| QIC.001 Pemilihan  | 43,056,000            | 42,752,000            | 99.29 %        | 304,000               |
| 201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)  | 3,955,000             | 3,651,000             | 92.31 %        | 304,000               |
| 202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)  | 31,205,000            | 31,205,000            | 100.00 %       | 0                     |
| 301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)  | 500,000               | 500,000               | 100.00 %       | 0                     |
| 302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)   | 7,396,000             | 7,396,000             | 100.00 %       | 0                     |
| <b>CQ.6842 Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>3,789,013,000</b>  | <b>746,374,184</b>    | <b>19.70 %</b> | <b>3,042,638,816</b>  |
| QCE Penanganan Perkara   | 802,422,000           | 144,400,184           | 18.00 %        | 658,021,816           |
| QCE.001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 802,422,000           | 144,400,184           | 18.00 %        | 658,021,816           |
| 201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)  | 13,052,000            | 3,848,250             | 29.48 %        | 9,203,750             |
| 202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)   | 109,490,000           | 83,971,434            | 76.69 %        | 25,518,566            |
| 203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)   | 54,960,000            | 28,240,500            | 51.38 %        | 26,719,500            |
| 301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)   | 413,400,000           | 14,315,000            | 3.46 %         | 399,085,000           |
| 302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)  | 105,760,000           | 6,875,000             | 6.50 %         | 98,885,000            |
| 303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)  | 105,760,000           | 7,150,000             | 6.76 %         | 98,610,000            |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  | 2,986,591,000         | 601,974,000           | 20.16 %        | 2,384,617,000         |
| QIC.001 Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  | 2,986,591,000         | 601,974,000           | 20.16 %        | 2,384,617,000         |
| 201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)   | 9,510,000             | 7,535,000             | 79.23 %        | 1,975,000             |
| 202 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)   | 69,456,000            | 66,054,000            | 95.10 %        | 3,402,000             |
| 203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)   | 53,565,000            | 20,845,000            | 38.92 %        | 32,720,000            |

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
 Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

| Uraian  | Pagu Revisi           | Realisasi TA 2023     |                | SISA ANGGARAN         |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|   |                       | s.d. Periode          | %              |                       |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>  | <b>49.824.666,000</b> | <b>29.819.977,471</b> | <b>59,85 %</b> | <b>20.004.688,529</b> |
| 301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota) | 38,060,000            | 1,050,000             | 2.76 %         | 37,010,000            |
| 302 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)                           | 385,300,000           | 119,288,750           | 30.96 %        | 266,011,250           |
| 303 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)    | 357,100,000           | 41,417,250            | 11.60 %        | 315,682,750           |
| 401 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)                           | 2,073,600,000         | 345,784,000           | 16.68 %        | 1,727,816,000         |
| <b>WA Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>12,560,240,000</b> | <b>8,739,625,422</b>  | <b>69.58 %</b> | <b>3,820,614,578</b>  |
| <b>WA.4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal</b>   | <b>29,710,000</b>     | <b>7,240,000</b>      | <b>24.37 %</b> | <b>22,470,000</b>     |
| <b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>   | <b>29,710,000</b>     | <b>7,240,000</b>      | <b>24.37 %</b> | <b>22,470,000</b>     |
| <b>EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja</b>  | <b>29,710,000</b>     | <b>7,240,000</b>      | <b>24.37 %</b> | <b>22,470,000</b>     |
| 201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi   | 9,300,000             | 0                     | 0.00 %         | 9,300,000             |
| 301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota   | 20,410,000            | 7,240,000             | 35.47 %        | 13,170,000            |
| <b>WA.4356 Pengelolaan Data dan Informasi</b>   | <b>180,346,000</b>    | <b>86,892,963</b>     | <b>48.18 %</b> | <b>93,453,037</b>     |
| <b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>  | <b>180,346,000</b>    | <b>86,892,963</b>     | <b>48.18 %</b> | <b>93,453,037</b>     |
| <b>EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu</b>  | <b>65,922,000</b>     | <b>7,335,900</b>      | <b>11.13 %</b> | <b>58,587,000</b>     |
| 201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi                        | 45,232,000            | 3,235,000             | 7.15 %         | 41,997,000            |
| 301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota                  | 20,690,000            | 4,100,000             | 19.82 %        | 16,590,000            |
| <b>EBA.963 Layanan Data dan Informasi</b>   | <b>114,424,000</b>    | <b>79,557,963</b>     | <b>69.53 %</b> | <b>34,866,037</b>     |
| 201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi  | 93,734,000            | 75,592,963            | 80.65 %        | 18,141,037            |
| 301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota                                      | 20,690,000            | 3,965,000             | 19.16 %        | 16,725,000            |
| <b>WA.6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum</b>  | <b>11,870,530,000</b> | <b>8,450,349,178</b>  | <b>71.19 %</b> | <b>3,420,180,822</b>  |
| <b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>  | <b>11,166,811,000</b> | <b>7,972,757,218</b>  | <b>71.40 %</b> | <b>3,194,053,782</b>  |
| <b>EBA.956 Layanan BMN</b>  | <b>126,202,000</b>    | <b>45,946,400</b>     | <b>36.41 %</b> | <b>80,255,600</b>     |
| 201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi  | 102,952,000           | 34,600,400            | 33.61 %        | 68,351,600            |
| 301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota  | 23,250,000            | 11,346,000            | 48.80 %        | 11,904,000            |
| <b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>  | <b>11,040,609,000</b> | <b>7,926,810,818</b>  | <b>71.80 %</b> | <b>3,113,798,182</b>  |
| 001 Gaji dan Tunjangan  | 5,594,916,000         | 4,505,424,159         | 80.53 %        | 1,089,491,841         |
| 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor   | 5,445,693,000         | 3,421,386,659         | 62.83 %        | 2,024,306,341         |
| <b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>  | <b>90,376,000</b>     | <b>76,050,000</b>     | <b>84.15 %</b> | <b>14,326,000</b>     |
| <b>EBB.951 Layanan Sarana Internal</b>  | <b>90,376,000</b>     | <b>76,050,000</b>     | <b>84.15 %</b> | <b>14,326,000</b>     |
| 203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi  | 90,376,000            | 76,050,000            | 84.15 %        | 14,326,000            |
| <b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>   | <b>613,343,000</b>    | <b>401,541,960</b>    | <b>65.47 %</b> | <b>211,801,040</b>    |
| <b>EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>   | <b>59,858,000</b>     | <b>38,138,823</b>     | <b>63.72 %</b> | <b>21,719,177</b>     |
| 201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi  | 41,448,000            | 32,262,823            | 77.84 %        | 9,185,377             |
| 301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota  | 18,410,000            | 5,876,200             | 31.92 %        | 12,533,800            |
| <b>EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>  | <b>52,100,000</b>     | <b>34,626,583</b>     | <b>66.46 %</b> | <b>17,473,417</b>     |
| 201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi   | 47,260,000            | 32,336,583            | 68.42 %        | 14,923,417            |
| 301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota                                  | 4,840,000             | 2,290,000             | 47.31 %        | 2,550,000             |
| <b>EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan</b>   | <b>473,767,000</b>    | <b>325,226,554</b>    | <b>68.65 %</b> | <b>148,540,446</b>    |
| 201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi  | 169,292,000           | 93,591,424            | 55.28 %        | 75,700,576            |
| 301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota  | 304,475,000           | 231,635,130           | 76.08 %        | 72,839,870            |
| <b>EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</b>  | <b>27,618,000</b>     | <b>3,550,000</b>      | <b>12.85 %</b> | <b>24,068,000</b>     |
| 201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi  | 7,850,000             | 0                     | 0.00 %         | 7,850,000             |

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Agustus 2023

Kementerian: 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
 Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 Satuan Kerja : 686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

31 AGUSTUS 2023

| Uraian  | Pagu Revisi           | Realisasi TA 2023     |                | SISA ANGGARAN         |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|   |                       | s.d. Periode          | %              |                       |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>  | <b>49,824,666,000</b> | <b>29,819,977,471</b> | <b>59.85 %</b> | <b>20,004,688,529</b> |
| 301 Pengelolaan kelatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota        | 19,768,000            | 3,550,000             | 17.96 %        | 16,218,000            |
| <b>WA.6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM</b>                             | <b>479,654,000</b>    | <b>195,143,281</b>    | <b>40.68 %</b> | <b>284,510,719</b>    |
| <b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>                            | <b>348,158,000</b>    | <b>104,679,734</b>    | <b>30.07 %</b> | <b>243,478,266</b>    |
| <b>EBA.957 Layanan Hukum</b>  | <b>136,368,000</b>    | <b>30,059,200</b>     | <b>22.04 %</b> | <b>106,308,800</b>    |
| 201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi  | 37,958,000            | 19,830,000            | 52.24 %        | 18,128,000            |
| 202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi                           | 33,240,000            | 420,000               | 1.26 %         | 32,820,000            |
| 203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi                                      | 5,850,000             | 2,053,400             | 35.10 %        | 3,796,600             |
| 301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota        | 48,680,000            | 7,755,800             | 15.93 %        | 40,924,200            |
| 302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota                                | 10,640,000            | 0                     | 0.00 %         | 10,640,000            |
| <b>EBA.962 Layanan Umum</b>   | <b>108,170,000</b>    | <b>53,258,954</b>     | <b>49.24 %</b> | <b>54,911,046</b>     |
| 201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi       | 46,990,000            | 31,184,000            | 66.36 %        | 15,806,000            |
| 301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota | 61,180,000            | 22,074,954            | 36.08 %        | 39,105,046            |
| <b>EBA.969 Layanan Bantuan Hukum</b>                                      | <b>103,620,000</b>    | <b>21,361,580</b>     | <b>20.62 %</b> | <b>82,258,420</b>     |
| 201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi            | 29,200,000            | 0                     | 0.00 %         | 29,200,000            |
| 202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi                           | 34,420,000            | 21,361,580            | 62.06 %        | 13,058,420            |
| 301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota                               | 40,000,000            | 0                     | 0.00 %         | 40,000,000            |
| <b>EBC Layanan Manajemen SDM Internal</b>                                 | <b>131,496,000</b>    | <b>90,463,547</b>     | <b>68.80 %</b> | <b>41,032,453</b>     |
| <b>EBC.954 Layanan Manajemen SDM</b>                                      | <b>131,496,000</b>    | <b>90,463,547</b>     | <b>68.80 %</b> | <b>41,032,453</b>     |
| 201 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariat Bawaslu Provinsi             | 61,936,000            | 54,986,047            | 88.78 %        | 6,949,953             |
| 301 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota       | 69,560,000            | 35,477,500            | 51.00 %        | 34,082,500            |

Hal 5 dari 5

Mengetahui  
Kepala Sekretariat,



Nikson Entengo, S.IP., M.Si  
NIP. 19791122 200212 1 008